

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik, maka pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sangat penting. Pengertian terhadap objek yang diteliti merupakan salah satu unsur dalam pemahaman. Untuk itu penelitian merupakan penjelasan dari variabel yang terdapat dalam penelitian.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.1.1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik merupakan semua barang dan jasa hasil dari ekonomi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan faktor produksi yang dimiliki penduduk di daerah tersebut. Sedangkan produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan yang diterima dari luar daerah maupun luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang dibayarkan ke luar daerah maupun luar negeri tersebut. Jadi produk regional adalah produk yang dihasilkan karena faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah. Produk domestik regional bruto merupakan nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah domestik di negara yang menyebabkan aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan faktor produksi yang dimiliki oleh residen atau non residen. PDRB atas dasar harga berlaku dikenal dengan PDRB nominal yang disusun berdasarkan harga berlaku yang bertujuan untuk melihat struktur perekonomian.

Sedangkan PDRB atas harga konstan berdasarkan harga pada tahun dasar yang bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi (BPS, 2016).

Gambaran keseluruhan mengenai perekonomian wilayah dapat diketahui pada PDRB. Perekonomian wilayah sendiri merupakan peningkatan pendapatan masyarakat atau penduduk secara keseluruhan berupa kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi pada suatu wilayah dan kemudian dilakukan perhitungan nilai harga berlaku namun untuk mengetahui setiap tahunnya dinyatakan dalam bentuk rill yang artinya dibentuk dengan harga konstan. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan ramalan, bermacam rasio, dan ukuran disparitas regional.

Data PDRB menggambarkan kemampuan dari suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Maka PDRB yang dihasilkan setiap daerah berbeda karena bergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi (faktor produksi) yang dimiliki setiap daerah. Secara umum, PDRB digunakan untuk berbagai tujuan, tetapi yang terpenting adalah untuk mengukur kinerja ekonomi secara keseluruhan. Jumlah ini akan sama dengan jumlah nilai nominal dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, serta ekspor neto.

2.1.1.2 Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto dapat dihitung melalui dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

1. Metode Langsung

Metode langsung merupakan metode perhitungan menggunakan data yang bersumber dari daerah. Metode langsung dapat memperlihatkan karakteristik sosial ekonomi setiap daerah. Selain itu, pemakaian data daerah juga dapat digunakan untuk menyempurnakan data statistik daerah yang lemah. Hasil perhitungan dengan metode ini akan memperlihatkan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah.

a. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi adalah metode perhitungan dengan memperhatikan jumlah hasil produksi dari berbagai sektor. Pendekatan ini menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari setiap nilai produksi bruto masing-masing sektor dan subsektor. Pendekatan ini juga biasa disebut sebagai pendekatan nilai tambah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi.

Penghitungan nilai tambah dilakukan dengan cara output dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup beberapa komponen pendapatan faktor, seperti bunga, upah, keuntungan dan sewa tanah, pajak tidak langsung neto, serta penyusutan. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari setiap sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, maka akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto.

b. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan adalah suatu metode yang digunakan untuk menghitung PDRB dengan menjumlahkan seluruh faktor penerimaan hasil produksi seperti upah, investasi, sewa, dan profit. Untuk sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari profit, maka surplus usahanya tidak diperhitungkan. Yang termasuk ke dalam surplus usaha di sini berupa bunga, keuntungan, serta sewa tanah.

c. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan Pengeluaran adalah seluruh komponen permintaan akhir, yaitu pengeluaran konsumsi pemerintah pembentukan modal tetap domestik bruto perubahan inventori, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, serta ekspor neto.

Ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto.

Pendekatan pengeluaran dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

1. Pendekatan penawaran yang terdiri dari metode penjualan eceran, arus barang, dan metode penilaian eceran.

2. Pendekatan permintaan yang terdiri dari metode anggaran rumah tangga, survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, metode *balance sheet* dan metode statistik perdagangan luar daerah.

Kedua cara tersebut dimaksudkan untuk memperkirakan beberapa komponen permintaan akhir seperti perubahan stok, pembentukan modal bruto, konsumsi rumah tangga, ekspor impor, Konsumsi pemerintahan, dan konsumsi lembaga swasta non profit.

2. Metode Tidak Langsung (Metode Alokasi)

Metode tidak langsung adalah metode penghitungan alokasi dengan cara mengalokasikan PDB menjadi PDRB provinsi atau sebaliknya, yaitu PDRB provinsi menjadi PDRB kabupaten atau kota dengan menggunakan beberapa indikator produksi dan indikator lainnya yang sesuai sebagai alokator (Sukirno, 2000). Alokator yang digunakan dapat didasarkan atas:

- a. Nilai produksi bruto,
- b. Jumlah produksi fisik,
- c. Tenaga kerja,
- d. Penduduk, dan
- e. Alokator lainnya yang dianggap cocok untuk daerah tersebut.

Dengan menggunakan salah satu dari alokator tersebut maka dapat memperhitungkan persentase masing-masing kabupaten/kota terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor.

2.1.2 Jumlah Penduduk

2.1.2.1 Pengertian Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2013) penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Sedangkan menurut Said (2012) penduduk merupakan jumlah orang yang menetap di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Menurut Mudrajat Kuncoro (1997) jumlah penduduk pada pembangunan ekonomi suatu wilayah merupakan masalah yang mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya realisasi, maka tujuan pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan terkurasnya sumber daya, kerusakan lingkungan, kurangnya tabungan, dan kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan permasalahan sosial seperti keterbelakangan, kemiskinan, dan kelaparan.

Di sisi lain, Adioetomo (2010) mengemukakan bahwa jumlah penduduk yang terlampau besar akan menekan standar hidup masyarakat. Terutama jika jumlah penduduk dikaitkan dengan lahan pertanian dan luas tanah yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Masalah yang serius bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan muncul akibat dari pertumbuhan penduduk yang

cepat. Oleh karena itu, besarnya jumlah penduduk harus diimbangi dukungan ekonomi yang tinggi agar tidak menimbulkan masalah seperti kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi.

Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah bagi pembangunan yang akan dilakukan. Karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya laju pertumbuhan tenaga kerja, sementara daerah belum mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas (Arsyad, 2004).

2.1.3 Sektor Unggulan

2.1.3.1 Pengertian Sektor Unggulan

Sektor unggulan merupakan sektor yang keberadaannya berperan besar terhadap perekonomian suatu wilayah (Sambodo, 2002). Perencanaan pembangunan akan lebih berhasil jika pemerintah melakukan klasifikasi sektor ekonomi serta memprioritaskan potensi dari sektor yang menjadi unggulan daerah tersebut (Sutiyo dan Maharjan, 2017).

Sektor unggulan memiliki potensi yang lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor non unggulan di suatu wilayah terutama karena adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Sektor unggulan juga dapat menciptakan peluang investasi dengan memberdayakan potensi yang ada (Rachbini, 2001).

Sektor unggulan tidak hanya mengacu pada lokasi saja, melainkan pada suatu sektor yang menyebar dalam berbagai bidang ekonomi sehingga dapat menggerakkan perekonomian secara keseluruhan. Sektor unggulan juga dapat mendorong pertumbuhan bagi sektor lain, baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksi (Widodo, 2006).

Sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional, maupun internasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di suatu wilayah mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik.

Suatu daerah akan memiliki sektor unggulan jika daerah tersebut dapat bersaing pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyanto, 2000). Sektor unggulan di suatu wilayah juga berhubungan erat dengan data PDRB dari daerah bersangkutan.

2.1.3.2 Kriteria Sektor Unggulan

Menurut Rachbini (2001) ada empat kriteria agar suatu sektor menjadi sektor unggulan, yaitu:

1. Sektor tersebut harus mempunyai permintaan yang cukup besar atas produk yang dihasilkan sehingga laju pertumbuhan akan berkembang pesat akibat dari efek permintaan tersebut.
2. Fungsi Produksi baru bergeser dengan kapasitas yang lebih luas karena adanya perubahan teknologi yang teradopsi.
3. Peningkatan investasi dari hasil-hasil produksi sektor unggulan tersebut.
4. Sektor tersebut harus memberi pengaruh terhadap sektor lain.

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, di mana daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi.

Menurut Ambardi dan Socia (2002) kriteria sektor unggulan suatu daerah, diantaranya:

1. Sektor unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian. Artinya, sektor unggulan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran.
2. Sektor unggulan memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas lainnya.
3. Sektor unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek-aspek lainnya.

4. Sektor unggulan suatu daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain baik dari segi konsumen maupun pasokan bahan baku.
5. Sektor unggulan memiliki teknologi yang terus meningkat, terutama mengenai inovasi teknologi.
6. Sektor unggulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya.
7. Sektor unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran, pertumbuhan, hingga penurunan. Maka sektor unggulan lainnya harus mampu menggantikannya.
8. Sektor unggulan tidak rentan terhadap gejolak internal dan eksternal.
9. Pengembangan komoditas unggulan harus mendapat berbagai bentuk dukungan. Misalnya dukungan keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif, dan lain-lain.
10. Pengembangan sektor unggulan berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan.

2.1.4 Ketimpangan Pembangunan

2.1.4.1 Pengertian Ketimpangan

Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mengurangi ketimpangan. Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian

suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata.

Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini yang membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Menurut kuncoro (2006), ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat. Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di berbagai daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan *gap* atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2010).

Todaro (2004) dalam bukunya mengemukakan bahwa pembangunan juga membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cepat. Distribusi pembangunan ekonomi yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam berbagai hal, salah satunya ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pemecahan permasalahan ketimpangan bukan dengan tujuan agar semua masyarakat berada pada tingkatan yang sama, melainkan bagaimana caranya agar disparitas itu mengecil.

2.1.4.2 Ukuran Ketimpangan

Untuk menganalisis seberapa besarnya ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah, perhitungan ketimpangan pembangunan bisa dilakukan melalui perhitungan Indeks Williamson. Jeffrey G. Williamson (1965) meneliti hubungan

antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data 25 ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Kemudian ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang, jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Williamson menggunakan Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Selain Indeks Williamson, Ying menggunakan indeks ketimpangan regional. Indeks ketimpangan regional tersebut dapat dibagi menjadi dua subindikasi, yaitu ketimpangan regional dalam wilayah (*within*) dan ketimpangan regional antar wilayah atau regional (*between*). Dengan menggunakan alat analisis Indeks Entropi Theil maka akan diketahui ada atau tidaknya ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.1.4.3 Dampak Ketimpangan

Menurut Todaro (2004) terjadinya ketimpangan pembangunan dapat memberikan dampak yaitu berupa dampak positif dan dampak negatif. Positifnya, dapat mendorong daerah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan akan tercapai. Negatifnya, dapat menimbulkan beberapa masalah, diantaranya inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas sosial dan solidaritas serta ketimpangan yang tinggi akan dirasa tidak adil.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan ketimpangan antar wilayah (yang maju dan tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan maupun antar wilayah dapat menimbulkan permasalahan seperti kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang semakin tajam dan melebar.

Jika pertumbuhan ekonomi dimulai dan ketimpangan pendapatan menurun secara bersamaan, pembangunan ekonomi suatu daerah berhasil. Ketika sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah dan hanya sebagian kecil yang berpenghasilan tinggi, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan adalah dua aspek penting dari pembangunan. Tetapi, pengalaman menunjukkan bahwa seringkali ada kompromi di antara keduanya. Dengan kata lain, mengutamakan keadilan cenderung memperlambat pertumbuhan.

2.1.5 Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut (Tarigan, 2005). Teori basis ini digolongkan ke dalam dua sektor, yaitu sektor basis dan sektor non basis.

Teori basis merupakan sebuah teori yang mengelompokkan sektor perekonomian ke dalam dua kelompok, yaitu sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis perekonomian adalah sektor ekonomi yang berperan dalam

pertumbuhan ekonomi daerah, mencukupi kebutuhan daerah itu sendiri, serta melakukan ekspor untuk daerah lain. Sedangkan sektor non basis perekonomian adalah sektor ekonomi yang kurang berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan cenderung kurang untuk mencukupi kebutuhan daerah sendiri atau bahkan daerah perlu mendatangkan dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan di daerah tersebut.

Secara tidak langsung daerah mempunyai kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain. Sektor basis yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar di daerah tersebut maupun luar daerah, sedangkan sektor non basis adalah sektor yang menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat di dalam batas wilayah perekonomian tersebut. Berdasarkan teori ini, sektor basis perlu dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Inti dari teori ini adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut.

Teori basis dikenal juga sebagai *advantage* (keunggulan kompetitif) yaitu kemampuan suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah atau pasar global. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi seperti sumber daya, teknologi, akses wilayah, pasar, sentra produksi, tenaga kerja, sifat masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Setiap daerah harus mengetahui sektor mana saja yang dapat menjadi penunjang perekonomian di daerahnya. Sebab perumusan kebijakan daerah tidak lepas dari perhatian khusus daerah tersebut terhadap sektor basis di daerahnya.

Bagian yang cukup sulit dalam menggunakan analisis basis ekonomi adalah memilih antara kegiatan basis dan kegiatan non basis (Tarigan, 2012).

2.1.5.1 Metode Pengklasifikasian Sektor Basis dan Non Basis

Dalam memilih antara sektor basis dan non basis, perlu digunakan metode yang tepat agar suatu daerah dapat menganalisis potensi daerahnya melalui sektor basis atau sektor unggulan. Oleh karena itu, terdapat metode untuk memilih antara sektor basis/unggulan dan sektor non basis, antara lain:

1. Metode Langsung

Metode ini dilakukan dengan survei langsung kepada pelaku usaha ke mana mereka memasarkan barang yang diproduksi dan dari mana mereka membeli bahan-bahan untuk kebutuhan menghasilkan produk. Dari jawaban mereka tersebut ditentukan berapa persen produk yang dijual ke luar wilayah dan berapa persen produk yang dijual di dalam wilayah.

2. Metode Tidak Langsung

Metode ini dilakukan dengan melakukan asumsi atau biasa disebut dengan metode asumsi. Dalam metode ini berdasarkan kondisi wilayah tersebut (berdasarkan data sekunder), ada kegiatan tertentu yang diasumsikan sebagai basis dan kegiatan lainnya sebagai kegiatan non basis. Kegiatan yang mayoritas produknya dijual ke luar wilayah atau mayoritas uang masuknya berasal dari luar wilayah langsung dianggap basis. Ada kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan basis, seperti kegiatan pertambangan dan pertanian yang hasilnya dibawa ke luar wilayah.

3. Metode Campuran

Metode campuran yaitu metode pengumpulan data sekunder, biasanya dari instansi pemerintah atau lembaga pengumpul data seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Asumsinya apabila 70% atau lebih produknya diperkirakan dijual ke luar wilayah maka itu disebut kegiatan basis, apabila apabila 70% dijual di dalam wilayah maka disebut non basis. Contohnya kelapa sawit adalah mayoritas untuk diekspor walaupun ada yang dibeli oleh produk minyak goreng yang ditunjuk untuk konsumsi lokal atau ekspor.

4. Metode *Location Quotient* (LQ)

Location Quotient merupakan suatu cara analisis kuantitatif dengan menggunakan data PDRB untuk membandingkan kontribusi nilai tambah sektor ekonomi suatu daerah terhadap sektor ekonomi yang sama pada tingkat provinsi (Alhempri et al., 2014).

Kelebihan LQ yaitu dapat mengidentifikasi komoditas unggulan, antara lain penerapannya yang sederhana dan tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit. Penyelesaian analisis cukup dengan *spread sheet* dari *excel* serta alat hitung lainnya. Keterbatasan LQ yaitu karena sederhananya pendekatan ini maka akan dituntut akurasi data. Sebaik apapun olahan LQ maka tidak akan bermanfaat jika data yang digunakan tidak valid.

5. Metode Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian wilayah. Studi Analisis Tipologi Klassen digunakan dengan tujuan mengidentifikasi posisi sektor perekonomian wilayah studi dengan memperhatikan sektor perekonomian wilayah referensi.

2.1.6 Teori Ketimpangan

Kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan (Baldwin, 1986). Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara berkembang (Jhingan, 1999).

Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat istilah daerah maju dan daerah terbelakang (Sjafrizal, 2012).

Menurut Kuncoro (2006) menyatakan bahwa ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia.

Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya *gap* atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut.

Simon Kuznet (1955) menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan seiring dengan adanya pemerataan pendapatan. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai Kurva Kuznet U terbalik, karena perubahan longitudinal (*time series*) dalam distribusi pendapatan.

2.1.6.1 Penyebab Ketimpangan

Menurut Arsyad (1992) ketimpangan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Pertambahan penduduk yang tinggi menyebabkan menurunnya pendapatan per kapita.
- 2) Inflasi, pertambahan pendapatan tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
- 3) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
- 4) Investasi yang besar dalam proyek padat modal dibandingkan dengan investasi padat karya sehingga pengangguran bertambah.
- 5) Rendahnya mobilitas sosial.

- 6) Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
- 7) Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara-negara berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara berkembang.
- 8) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Menurut Sjafrizal (2017) faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan adalah sebagai berikut:

- 1) Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah adanya perbedaan kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun kandungan sumber daya alam di setiap daerahnya berbeda-beda. Ada daerah yang memiliki minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak mempunyai. Ada daerah yang mempunyai deposit batu bara yang cukup besar, tetapi daerah lain tidak ada.

Demikian pula halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang juga sangat bervariasi, sehingga memengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam tersebut tentu saja akan memengaruhi kegiatan produksi

pada daerah bersangkutan. Daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang cukup banyak akan dapat memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya yang relatif murah, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat.

Berbeda dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam yang lebih sedikit hanya akan memproduksi barang dan jasa dengan biaya produksi lebih mahal sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut selanjutnya menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Dengan demikian, terlihat bahwa perbedaan kandungan sumber daya alam dapat mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang lebih tinggi.

2) Perbedaan Kondisi Geografis

Kondisi geografis yang dimaksud meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi ini kemudian akan memengaruhi ketimpangan ekonomi antar wilayah, karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan.

Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan memiliki tingkat produktivitas kerja yang lebih tinggi, sedangkan daerah dengan kondisi geografis yang kurang baik akan menyebabkan relatif rendahnya tingkat produktivitas kerja. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong para

investor untuk lebih memilih menanamkan modalnya di daerah yang kondisi demografisnya lebih baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bersangkutan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi di daerah yang kondisi geografisnya kurang baik akan lebih rendah karena para investor kurang tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

3) Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa antar wilayah dapat mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi, baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena jika mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan.

Dengan demikian migrasi yang kurang lancar akan menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak akan dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya, dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong kegiatan ekonominya.

4) Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan memengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi

tersebut kemudian akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Sebaliknya, jika konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah, maka akan mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.

Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah juga akan menunjukkan perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Oleh karena itu, adanya perbedaan pengeluaran pemerintah di suatu daerah dengan daerah lainnya akan menyebabkan ketimpangan pembangunan di daerah tersebut.

5) Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Tidak dapat dipungkiri bahwa investasi merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang mendapatkan alokasi investasi lebih besar baik dari pemerintah maupun swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi.

Alokasi investasi pemerintah ke suatu daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Apabila sistem pemerintahan yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung tinggi. Namun, apabila sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau

desentralisasi, maka dana investasi akan lebih dialokasikan ke pemerintah daerah, sehingga ketimpangan antar wilayah akan cenderung rendah. berbeda dengan investasi swasta yang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah.

Keuntungan lokasi tersebut ditentukan pula oleh ongkos transportasi baik untuk bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha, dan sewa tanah. Karena itulah, tidak mengherankan jika investasi cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang terkait atau berhubungan dengan permasalahan penelitian mengenai Analisis Sektor Unggulan dan Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2022. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Shinta Iffah Rosyidah, (2022) Analisis Potensi Sektor Ekonomi Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) dan Tipologi Klassen.	Analisis <i>Shift Share.</i>	Sektor fundamental, antara lain tujuh sektor di Kabupaten Sleman, enam sektor di Kabupaten Bantul, sebelas sektor di Kota Yogyakarta, delapan sektor di Kabupaten Kulonprogo, dan tujuh sektor di Kabupaten Gunungkidul.	Jurnal Ekonomi. Vol. 28, No. 3, ISSN: 258 0-4901
2	Yuni Purnama, Nurjihadi, dan Fitriah Permata Cita, (2017) Analisis Sektor Unggulan dan Pergeseran Struktur dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi NTB 2000- 2015	Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	Analisis <i>Shift Share</i>	Sektor unggulan di provinsi NTB tahun 2000-2015 didominasi sektor pertanian, pertambangan dan transportasi.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 2, No. 2, ISSN: 2528-6625

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Muhammad Alwi, Putu Karismawan, dan I Dewa Ketut Yudhas (2023) Analisis Penentuan Prioritas Sektor Ekonomi Dalam Pembangunan Daerah Pada Setiap Kabupaten Penyangga Kota Mataram	Data PDRB Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Analisis SLQ, analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan analisis <i>Overlay</i> .	Sektor yang perlu dijadikan prioritas pembangunan yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, dan pengadaan listrik dan gas.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9, No. 1, ISSN: 1412-7601
4	Louisa S. Manuhutu (2016) Penentuan Sektor Basis dan Non Basis di Kota Ambon	Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ).	Daerah dan tahun penelitian.	Sektor basis di Kota Ambon adalah sektor angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa lainnya, dan sektor listrik, gas.	Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi, Vol. 5, No. 2, ISSN: 2542-2568
5	Hadina Rizky Amalia Herry Yulistiyono (2020) Analisis Peran Sektor Basis dan Non Basis dalam	Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ).	Analisis <i>Shift Share</i> , Model Rasio Pertumbuhan (MRP), elastisitas tenaga kerja, dan analisis koefisien tenaga kerja.	Sektor ekonomi yang menjadi basis adalah sektor pertambangan, industri pengolahan, dan pengadaan listrik dan gas.	Jurnal Ilmiah Aset, Vol. 22, No. 2, ISSN: 1693-9289

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Gresik				
6	Jefri Tipka (2014) Analisis LQ dan Analisis <i>Shift- Share</i> Dalam Pemanfaatan Ekonomi Sektoral Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008-2010	Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ).	Analisis <i>Shift Share</i> .	Sektor unggulan di Kecamatan Banda, Tehoru dan Seram Utara didominasi oleh sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan sektor unggulan di Kota Masohi didominasi sektor listrik dan air bersih, dan konstruksi.	Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, Vol. 8, No. 1, ISSN: 1978-7227
7	Marynta Putri Pratama (2020) Analisis Kontribusi Sektor Basis Non Basis: Penentu Potensi Produk Unggulan Kabupaten Kebumen	Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ).	Analisis <i>Shift Share</i> .	Komoditas jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai memiliki angka $LQ > 1$ yang berarti lima produk ini menjadi produk basis. Hasil analisis <i>Shift Share</i> menunjukkan Sektor potensial yaitu jagung, sawah, ubi kayu, kedelai, dan kacang hijau.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 9, No. 1, ISSN: 2580-5103

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Irwan Suliantoro (2022) Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Tegal Berdasarkan Pdrb Tahun 2016-2021	Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ).	Analisis <i>Dynamic Location Quotient</i> (DLQ).	Sektor unggulan Kabupaten Tegal, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan sektor jasa lainnya.	Jurnal Manajemen Keuangan Publik, Vol. 6, No. 2, ISSN: 2354-5704
9	Ayu Febri, Budi Widayanto, dan Wulandari Dwi (2023) Analisis Sektor Basis dan Perkembangan Sektor Basis di Kota Salatiga: Pendekatan <i>Location Quotient</i> dan <i>Dynamic Location Quotient</i>	Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ).	Analisis <i>Dynamic Location Quotient</i> (DLQ).	Sektor basis di Kota Salatiga yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, keuangan asuransi, sektor <i>real estate</i> , sektor jasa perusahaan, dan sektor administrasi pemerintahan, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.	Jurnal Agribisnis, Vol. 25, No. 1, ISSN: 2354-5704

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Istiqamah (2018) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan (Studi Provinsi-provinsi di Indonesia)	Analisis ketimpangan.	Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin provinsi-provinsi di Indonesia.	Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Vol. 7, No. 3, ISSN: 2303-1255
11	Muhammad Ridho, Zulgani, dan Erni Achmad (2022) Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah antar Provinsi di Pulau Sumatera	Analisis Indeks Williamson.	Analisis regresi data panel.	Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Kep. Riau tergolong ke ketimpangan tinggi. Provinsi Aceh dan Riau, ketimpangan sedang. Provinsi Sumatera Barat, dan Lampung ketimpangan rendah.	Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Vol. 11, No. 1, ISSN: 2303-1255
12	Gracetyani Ovicha Naibaho, Juliana Ruth Mandei, dan Lyndon Reinhard Jacob Pangemanan (2020)	Analisis Indeks Williamson dan Tipologi Klassen.	Pola dan struktur pertumbuhan ekonomi.	Rata-rata angka Indeks Williamson di Provinsi Sulawesi Utara periode penelitian adalah sebesar 0,49 dengan	Jurnal Agrososi oekonomi, Vol. 16, No. 3, ISSN: 1907-4298

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Utara			kriteria ketidakmerataan rendah.	
13	Hendro Ekwarso, Taryono, dan Isyandi (2016) Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan di Kota Dumai	Analisis Indeks Williamson.	Daerah dan tahun penelitian.	Ketimpangan di Kota Dumai pada tahun 2014 relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun yaitu sebesar 0,2020.	Jurnal Sosial Ekonomi Pembang unan, Vol. 7, No. 19, ISSN: 2087- 4502
14	Nidya Waras Sayekti (2017) Ketimpangan Ekonomi dan Kebijakan Pemerataan Pembangunan di Provinsi Banten	Analisis ketimpangan pembanguna n.	Analisis koefisien gini (<i>Gini Ratio</i>).	Tingkat koefisien gini (<i>gini ratio</i>) di Provinsi Banten cukup berfluktuasi dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,424 dan menunjukkan kecenderungan menurun hingga mencapai angka	Jurnal <i>Budget</i> , Vol. 2, No. 1, ISSN: 2541- 5557

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				0,392 pada tahun 2016. Pemerintah Provinsi Banten menerapkan strategi pembangunan jangka panjang dengan memaksimalkan potensi daerah tertinggal.	
15	Noviar (2021) Analisis Ketimpangan dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2020	Analisis Indeks Williamson dan Tipologi Klassen.	Daerah dan tahun penelitian.	Ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten tidak merata yaitu diatas 0,7 dan terjadi ketimpangan yang cukup tinggi.	Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol. 5, No. 1, ISSN: 2597-4971

2.3 Kerangka Pemikiran

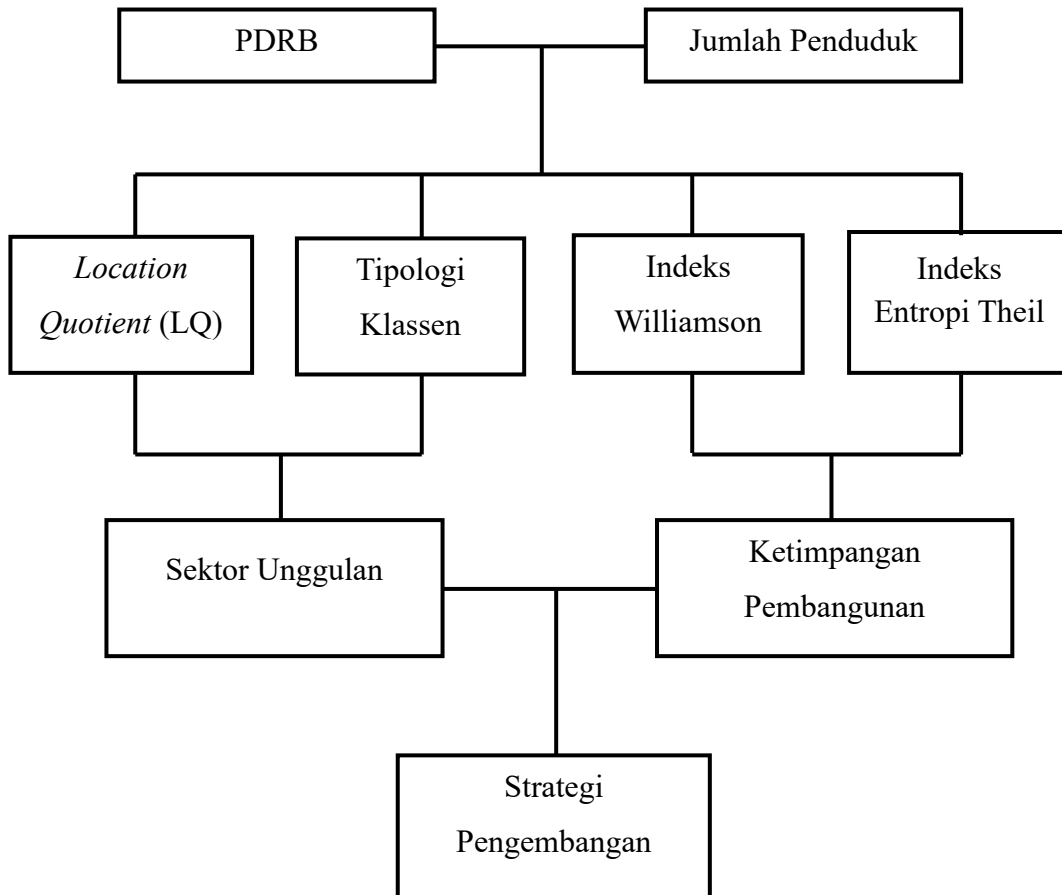
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi yang didukung oleh potensi wilayah tersebut. Tentunya pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing kota, serta faktor-faktor lainnya yang terkait dalam pertumbuhan ekonomi. Sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perlu adanya analisa tentang potensi

ekonomi dan ketimpangan pembangunan berdasarkan PDRB kota dan jumlah penduduk yang dapat dikembangkan. Untuk menganalisis sektor ekonomi unggulan menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ) dan analisis Tipologi Klassen.

Sedangkan untuk analisis ketimpangan pembangunan menggunakan analisis Indeks Williamson dan analisis Indeks Entropi Theil. Dengan melakukan perhitungan tersebut maka akan diketahui terjadi pemerataan atau tidak. Karena apabila terjadi ketidakmerataan maka akan menyebabkan ketimpangan pembangunan.

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan akan memberikan dorongan kepada daerah yang lain agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing dalam meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan pembangunan. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2004).

Dengan menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ), analisis Tipologi Klassen, analisis Indeks Williamsom, dan analisis Indeks Entropi Theil tersebut maka akan dapat diketahui sektor unggulan dan ketimpangan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2022.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Analisis Sektor Unggulan dan Ketimpangan
Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2022